

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas dan fungsi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kota Dumai masih belum optimal, hal ini terbukti dengan pelaksanaan fungsi yang diamanatkan oleh UU Penanggulangan Bencana dan juga Perwako BPBD belum terlaksana seperti, Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Selain fungsi diatas, BPBD juga belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanat UU Penanggulangan Bencana diantaranya a) menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, b) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, c) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dan d) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

2. Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan BPBD menemui beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah

penegakan hukum yang lemah, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya sumber daya manusia serta Kurangnya Sosialisasi Untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga pemerintah serta lembaga terkait harus melakukan upaya untuk Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, upaya yang dapat dilakukan adalah berupapengawasan dan penerapan sanksi hukum, pengadaan alat-alat pemadamana dan penunjang kegiatan, peningkatan sumber daya manusia serta Meningkatkan Sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 UU Penanggulangan Bencana mengamatkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah pembentukan BNPB dan juga BPBD di setiap daerah. Maka dari itu pemerintah dan juga pemerintah daerah harus saling bersinegris dalam melaksanakan fungsi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Selain itu BPBD Kota Dumai hendaknya menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang telah di atur oleh UU Pennaggulungan Bencana dan Perwako BPBD untuk mendaatkan hasil yang lebih baik.
- 2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan

meningkatkan beberapa kegiatan dan juga melaksanakan tugas dan fungsi BPBD yang belum terlaksanakan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Dumai diantaranya adalah berupapengawasan dan penerapan sanksi hukum, pengadaan alat-alat pemadamana dan penunjang kegiatan, peningkatan sumber daya manusia serta Meningkatkan Sosialisasi. Hendaknya BPBD Kota Dumai lebih memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana sehingga kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi.

